

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi laut merupakan salah satu moda yang menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, maka dari itu dibutuhkan layanan transportasi laut yang handal dan berdaya saing untuk mendukung kelancaran arus mobilisasi penumpang dan barang (Taharuddin et al., 2024). Dalam pemberian jasa pelayanan transportasi, pemerintah menjadikan pelabuhan sebagai salah satu sektor perekonomian. Pelabuhan sendiri merupakan daratan dan perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk aktivitas penyandaran kapal, bongkar muat barang dan penumpang, terminal, serta tempat berlabuh kapal yang dilengkapi oleh fasilitas penunjang kegiatan keselamatan pelayaran. Dari perkembangan aktivitas yang ada di pelabuhan, dibutuhkan perusahaan pelayaran melalui Perusahaan Keagenan Kapal sebagai pihak ketiga untuk perwakilan antara pihak produsen dan konsumen (Priyohadi et al., 2020).

Menurut Kosasih (2012) yang dikutip dari (Anwar & Nuryaman, 2021) keagenan merupakan perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal milik atau kapal *charter* atas dasar penunjukan dari *principle*. Perusahaan keagenan kapal merupakan industri yang bergerak di bidang penawaran layanan jasa sehingga persaingan untuk mendapatkan pelanggan yaitu dengan berlomba-lomba memberikan kepuasan layanan terhadap konsumen (Putri & Rahayu, 2022). Oleh karena itu, diperlukan modernisasi sistem pelayanan berbasis digital sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan jasa pada perusahaan keagenan kapal (Anggoro & Susanti, 2022). Pelayanan jasa pada perusahaan keagenan

Kapal dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut nasional maupun angkutan laut asing ketika kapal dari perusahaan tersebut masuk ke perairan Indonesia. Keagenan kapal dalam melakukan bidang usaha utamanya sebagai pelayanan jasa bertujuan untuk melaksanakan kebijakan program pemerintah di sektor ekonomi di wilayah pelabuhan. Kualitas pelayanan jasa keagenan kapal diukur dari produktivitas, meminimalisir adanya kendala, dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Salah satu proses pelayanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan keagenan kapal adalah pengurusan proses *clearance* (Lesmini, Najoan, et al., 2022).

Berdasar pada Renindya (2020) dan Dirhamsyah (2021) yang dikutip dari penelitian (Auliya et al., 2022) menyebutkan bahwa proses *clearance* dibagi menjadi dua yaitu *clearance in* dan *clearance out*. Perusahaan keagenan kapal bertanggung jawab pada pengurusan dokumen saat kapal akan masuk hingga keluar dari pelabuhan. Kegiatan pelayanan *clearance in/out* yang tidak baik dapat mengakibatkan terhambatnya kelancaran penanganan kapal saat akan masuk atau keluar pelabuhan serta berakibat tertundanya kegiatan bongkar muat yang akan menimbulkan pembengkakan biaya. Oleh karena itu prosedur dan proses penanganan *clearance* menjadi salah satu faktor penilaian mutu jasa pelayanan kapal. Selain itu, pengurusan *clearance* yang lancar bertujuan sebagai izin awal dalam pelaksanaan *bunker, docking/repairing*, dan pengurusan perpanjangan sertifikat kapal serta kebutuhan *crew* kapal di Syahbandar (Ridwan et al., 2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015. Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada 13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan. Transformasi sistem pelayanan dilakukan dengan tujuan meminimalisir tatap

muka antara pengguna jasa yaitu perusahaan keagenan kapal dengan petugas pemerintah yang berwenang. Tujuan dari transformasi sistem pelayanan tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan untuk memberantas pungli di sektor perhubungan laut (Nugraha & Alwin, 2022).

Modernisasi sistem pelayanan pada dunia maritim telah diwajibkan oleh *International Maritim Organization* (IMO) dengan mengeluarkan sistem *Maritime Single Window* (MSW) atau biasa dikenal Sistem Jendela Tunggal Maritim. MSW merupakan sebuah sistem pertukaran data atau informasi yang dirancang untuk peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen pada pihak terkait secara terintegritas seperti otoritas pelabuhan, bea cukai, dan agen pengiriman. Indonesia sebagai salah satu anggota bagian dari IMO mengimplementasikan *MSW* melalui *Single Submission* (SSM). SSM diterapkan sebagai salah satu upaya untuk menyederhanakan birokrasi serta peningkatan pelayanan di sektor angkutan laut. *International Maritim Organization* (IMO) memberi batas bahwa per 1 Januari 2024 seluruh negara anggota yang terdaftar harus menerapkan *Maritime Single Window* (MSW) (Malau, et al., 2023). Negara Indonesia sebelumnya hanya menerapkan *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui *Inaportnet*. *Inaportnet* merupakan sistem yang hanya berfokus pada KSOP saja, sehingga agen kapal tetap melakukan pengajuan ke laman sistem dari masing-masing instansi terkait. (Suryandi et al., 2022).

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara pra penelitian, PT Varia Usaha Lintas Segara (VULS) sebagai perusahaan keagenan kapal yang ada di Gresik tentu saja sudah menerapkan *Single Submission* (SSM) pengangkut sejak Agustus 2023 untuk mendukung implementasi program pemerintah atas dasar dari kebijakan IMO dengan tujuan memperlancar kegiatan penanganan proses *clearance* untuk Kapal Curah (*Bulk Carrier*) asing maupun lokal. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa masalah yang terjadi di PT. Varia

Usaha Lintas Segara dalam penerapan SSM seperti terjadinya *maintenance* sehingga tetap menggunakan bantuan *Inaportnet* sebagai pengganti SSM untuk menunjang proses *clearance in* dan *out* kapal. Integrasi sistem sering ditemukan kendala seperti SDM yang belum terbiasa menggunakan sistem baru dan fasilitas penunjang yang belum mendukung sehingga menyebabkan efisiensi pelayanan menjadi terhambat (Safitri et al., 2022).

Dari penjabaran di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut Terhadap Efisiensi Pelayanan Proses *Clearance* Kapal pada PT Varia Usaha Lintas Segara”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas peneliti membuat batasan permasalahan agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas ke pembahasan di luar tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini fokus pada pengaruh penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut terhadap efisiensi Pelayanan proses *clearance* kapal di PT Varia Usaha Lintas Segara.
2. Proses *clearance* kapal yang diteliti adalah pelayanan proses *clearance* kapal asing.
3. Waktu pengumpulan data dilakukan Juli 2023 – Juli 2024

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan parameter yang telah diuraikan di atas diperoleh perumusan masalah dengan penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut sebagai variabel X dan efisiensi proses *clearance* kapal sebagai variabel Y.

1. Apakah penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut berpengaruh positif terhadap efisiensi pelayanan proses *clearance* kapal pada PT Varia Usaha Lintas Segara?
2. Apa saja faktor yang dapat menghambat penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut terhadap efisiensi pelayanan proses *clearance* Kapal pada PT Varia Usaha Lintas Segara?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sudah dikemukakan peneliti hendak mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut terhadap efisiensi pelayanan proses *clearance* kapal pada PT Varia Usaha Lintas Segara.
2. Mengetahui faktor yang dapat menghambat penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut terhadap efisiensi pelayanan proses *clearance* kapal pada PT Varia Usaha Lintas Segara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran pada perkuliahan terutama mata kuliah Keagenan Kapal, sehingga membantu dalam pemahaman penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut terhadap efisiensi pelayanan proses *clearance* kapal serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efisiensi proses *clearance*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan proses *clearance* melalui penerapan *Single Submission* (SSM) Pengangkut.dengan memperhatikan faktor-faktor yang dihasilkan.